

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilaksanakan guna melakukan pengujian pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, kondisi yang memfasilitasi terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah dengan kompetensi SDM sebagai variabel pemoderasi. Sampel pada penelitian ini yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendikbudristek yang diamanahkan sebagai pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Setelah dilakukan analisis data serta pengujian hipotesis tentang pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, kondisi yang memfasilitasi terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah dengan kompetensi SDM sebagai variabel pemoderasi pada 411 sampel yang sudah terpilih, serta berdasarkan dari hasil penelitian yang dipaparkan pada bab di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Persepsi manfaat berpengaruh signifikan terhadap *intention to use* KKP, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji yakni $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,750 > 1,966$ dan angka signifikansi yaitu $0,006 < 0,050$. Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan persepsi manfaat berpengaruh signifikan terhadap *intention to use* KKP diterima.
- b. Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap *intention to use* KKP, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$, dimana $12,351 > 1,966$ dan nilai signifikansi menunjukkan angka $0,000 < 0,050$. Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap *intention to use* KKP diterima.
- c. Kondisi yang memfasilitasi berpengaruh signifikan terhadap *intention to use* KKP, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji $t_{hitung} > t_{table}$ yaitu $3,557 > 1,966$ dan nilai signifikansi menunjukkan $0,000 < 0,050$. Maka dari

itu, hipotesis yang menyatakan kondisi yang memfasilitasi berpengaruh signifikan terhadap *intention to use* KKP diterima.

- d. Kompetensi SDM dapat memoderasi hubungan antara persepsi manfaat terhadap *intention to use* KKP, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji $t_{hitung} < t_{table}$ yaitu $1,309 < 1,966$ dan nilai signifikansi menunjukkan $0,191 > 0,050$. Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan kompetensi SDM dapat memoderasi hubungan antara persepsi manfaat terhadap *intention to use* KKP ditolak.
- e. Kompetensi SDM dapat memoderasi hubungan antara persepsi kemudahan terhadap *intention to use* KKP, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji $t_{hitung} > t_{table}$ yaitu $2,061 > 1,966$ dan nilai signifikansi menunjukkan $0,040 < 0,050$. Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan kompetensi SDM dapat memoderasi hubungan antara persepsi kemudahan terhadap *intention to use* KKP diterima.
- f. Kompetensi SDM dapat memoderasi hubungan antara kondisi yang memfasilitasi terhadap *intention to use* KKP, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji $t_{hitung} < t_{table}$ yaitu $1,481 < 1,966$ dan nilai signifikansi menunjukkan $0,139 > 0,050$. Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan kompetensi SDM dapat memoderasi hubungan antara kondisi yang memfasilitasi terhadap *intention to use* KKP ditolak.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas pada penelitian ini, saran yang dapat disampaikan kepada berbagai pihak guna memperluas referensi yang dapat membantu yakni sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan baru khususnya terkait dengan kartu kredit pemerintah dengan menambahkan variabel lain yang tidak tercantum dalam penelitian ini. Kemudian memodifikasi model penelitian dengan menambahkan variabel moderasi atau mediasi serta variabel kontrol, dan variabel intervening untuk menyempurnakan temuan penelitian seperti dukungan manajemen puncak, kualitas sistem, dan

komitmen organisasi. Serta menggunakan lebih banyak sampel kementerian yang menggunakan kartu kredit pemerintah.

b. Bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintahan

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi analis keuangan atau pejabat perbendaharaan agar selalu memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang berada di bidang keuangan.

c. Bagi Pengguna KKP

Diharapkan setiap pengguna mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah terkait dengan penggunaan aplikasi SAKTI dan proses pertanggungjawaban administrasi pelaporan keuangan agar manfaat yang dirasakan, kemudahan yang diberikan, kondisi pendukung yang tersedia dapat di optimalkan di setiap unit satuan kerja. Kemudian, meningkatkan kompetensi di bidang keuangan seperti melakukan pelatihan dan sertifikasi. Hal tersebut dikarenakan kebijakan digitalisasi ini menjadi fokus utama pemerintah dalam pengelolaan APBN.